

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu negara karena mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam meningkatkan produksi barang dan jasa serta kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), yang menunjukkan kapasitas suatu negara dalam menghasilkan nilai tambah dari aktivitas ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak semata ditentukan oleh akumulasi modal dan investasi, melainkan juga oleh kualitas sumber daya manusia dan kondisi ketenagakerjaan. (Todaro & Smith, 2013). Namun, Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor fundamental karena tenaga kerja yang terdidik, sehat, dan memiliki keterampilan relevan akan lebih produktif serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Pendidikan yang berkualitas meningkatkan daya saing tenaga kerja, sementara kesehatan yang baik menjamin keberlangsungan produktivitas. Selain itu, pendapatan yang layak memperkuat daya beli masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi domestik (UNDP 2023).

Todaro & Smith, (2013). Menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pertumbuhan ekonomi karena pembangunan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup perubahan struktural, peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, dan perluasan pilihan masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh faktor-faktor produksi yang mampu meningkatkan

kapasitas perekonomian dalam jangka panjang. Salah satu faktor penting tersebut adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan produktif dapat meningkatkan produksi barang dan jasa, memperluas pendapatan rumah tangga, meningkatkan konsumsi, dan pada akhirnya mendorong aktivitas ekonomi. Dengan demikian, kesempatan kerja memiliki posisi strategis dalam proses pembangunan karena menjadi penghubung antara pertumbuhan output dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain aspek ketenagakerjaan, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor fundamental dalam pembangunan ekonomi. Tenaga kerja yang sehat, berpendidikan, memiliki keterampilan, dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi cenderung mempunyai produktivitas yang lebih tinggi. Pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan mendukung kemampuan individu untuk bekerja secara produktif, sedangkan standar hidup yang layak memperkuat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kapasitas ekonominya. Dalam konteks tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur capaian pembangunan manusia melalui dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. (Elmizan et al., 2025).

Hubungan antara kesempatan kerja, pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika pembangunan Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk usia kerja yang besar dan terus menghadapi kebutuhan penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja. Di satu sisi, besarnya jumlah tenaga kerja dapat menjadi modal pembangunan apabila tersedia pekerjaan yang produktif.

Namun, di sisi lain, keterbatasan kesempatan kerja, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, dominasi pekerjaan informal, serta ketimpangan antarwilayah dapat menghambat pemanfaatan tenaga kerja secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan akumulasi modal, tetapi juga memerlukan kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kualitas manusia.

Fenomena ketenagakerjaan di Indonesia juga memperlihatkan adanya persoalan ketidaksesuaian antara peningkatan jumlah angkatan kerja dan kemampuan pasar kerja dalam menyediakan pekerjaan yang produktif. Pertumbuhan penduduk usia kerja dan bertambahnya lulusan pendidikan setiap tahun meningkatkan kebutuhan terhadap lapangan kerja baru. Namun, penciptaan pekerjaan formal belum selalu mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut. Akibatnya, sebagian tenaga kerja terserap pada sektor informal yang memiliki karakteristik produktivitas, pendapatan, perlindungan kerja, dan jaminan sosial yang relatif beragam. Selain itu, mismatch keterampilan masih menjadi tantangan karena kompetensi tenaga kerja tidak selalu sesuai dengan kebutuhan industri, terutama pada sektor yang berkembang melalui digitalisasi, teknologi, manufaktur modern, dan jasa berbasis pengetahuan. (Kerja et al., 2020).

Permasalahan tersebut memiliki implikasi terhadap pembangunan ekonomi karena tenaga kerja yang tidak terserap secara optimal dapat mengurangi potensi produksi wilayah. Sebaliknya, perluasan kesempatan kerja dapat meningkatkan jumlah penduduk yang memperoleh pendapatan, memperkuat konsumsi rumah tangga, dan mendorong permintaan agregat. Dalam perspektif pembangunan, penciptaan kesempatan kerja juga berfungsi sebagai sarana distribusi manfaat

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya tidak hanya tercermin melalui kenaikan PDB atau PDRB, tetapi juga melalui peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Di samping persoalan ketenagakerjaan, ketimpangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah masih menjadi tantangan pembangunan Indonesia. Daerah yang memiliki akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik cenderung mempunyai kemampuan lebih besar dalam meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, wilayah yang menghadapi keterbatasan akses pelayanan dasar berpotensi mengalami hambatan dalam peningkatan kualitas manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat. Peningkatan kualitas manusia dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi, sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat memperbesar kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam membiayai pendidikan, kesehatan, dan peningkatan standar hidup. (Abidin et al., 2023).

Dalam konteks kewilayahan, persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika melihat kondisi makro kawasan Papua. Wilayah Papua memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibandingkan banyak wilayah lain di Indonesia. Kawasan ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, mencakup pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan potensi ekonomi berbasis lahan. Namun, besarnya potensi sumber daya alam belum selalu berjalan sejajar dengan pemerataan kualitas sumber daya manusia, akses infrastruktur, dan kesempatan kerja. Karakteristik geografis yang luas, persebaran penduduk yang

tidak merata, konektivitas antarwilayah, biaya logistik yang tinggi, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan menjadi tantangan struktural dalam pembangunan kawasan Papua. (Wambemu, 2022).

Kondisi makro Papua juga menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam membaca pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan output regional dapat dipengaruhi secara kuat oleh sektor-sektor tertentu, sehingga peningkatan PDRB belum tentu mencerminkan pemerataan kesempatan ekonomi pada seluruh masyarakat. Data resmi menunjukkan bahwa ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,11 persen, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 sebesar 4,22 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Papua tetap mengalami ekspansi, tetapi dinamika pertumbuhan antarperiode dan antar lapangan usaha perlu diperhatikan dalam menilai kualitas pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, peningkatan output regional perlu dianalisis bersama dengan indikator ketenagakerjaan dan pembangunan manusia agar dapat diketahui apakah pertumbuhan benar-benar menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Perubahan struktur administrasi wilayah melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru juga memberikan konteks penting dalam analisis pembangunan kawasan Papua. Kabupaten Merauke saat ini menjadi bagian dari Provinsi Papua Selatan bersama Kabupaten Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Pembentukan Provinsi Papua Selatan membuka peluang bagi percepatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan pusat pertumbuhan baru, dan peningkatan efektivitas kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah. Namun, pada saat yang sama, provinsi baru tersebut menghadapi tantangan dalam membangun struktur ekonomi yang produktif, memperluas kesempatan kerja,

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Secara makro, perekonomian Papua Selatan memiliki peranan strategis dalam kawasan selatan Papua. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024 mencapai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp33,38 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp18,96 triliun. Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp61,58 juta. Besarnya aktivitas ekonomi tersebut menunjukkan adanya kapasitas ekonomi regional yang cukup penting. Namun, capaian makro tersebut belum dengan sendirinya menjawab persoalan mengenai sejauh mana aktivitas ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang luas dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Papua Selatan memiliki basis ekonomi yang kuat pada pemanfaatan sumber daya alam, terutama pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan aktivitas pemerintahan. Karakteristik tersebut memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi daerah, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan struktural. Apabila pertumbuhan ekonomi lebih banyak bertumpu pada kegiatan yang padat modal, padat lahan, atau menggunakan teknologi tertentu, peningkatan output belum tentu menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam proporsi yang sama. Sebaliknya, sektor-sektor yang lebih padat karya dan berbasis ekonomi lokal berpotensi memberikan dampak yang lebih langsung terhadap kesempatan kerja masyarakat.

Dalam konteks Papua Selatan, Kabupaten Merauke memiliki posisi yang sangat strategis. Kabupaten Merauke terletak di kawasan selatan Papua dan

berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Posisi tersebut menjadikan Merauke penting dari aspek ekonomi, geopolitik, pertahanan, perdagangan lintas batas, dan konektivitas kawasan timur Indonesia. Selain itu, Merauke memiliki wilayah yang luas dengan potensi sumber daya alam yang beragam. Karakteristik wilayah dataran rendah dan ketersediaan lahan yang luas memberikan peluang besar bagi pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan berbagai kegiatan jasa.

Merauke dikenal sebagai salah satu wilayah penting dalam pengembangan pertanian di kawasan Papua. Kegiatan ekonomi pertanian mencakup tanaman pangan seperti padi dan komoditas pertanian lainnya, sedangkan subsektor peternakan memiliki peluang pengembangan melalui usaha ternak dan kegiatan pendukungnya. Pada sektor perikanan, posisi geografis Merauke yang berhadapan dengan Laut Arafura memberikan potensi besar bagi kegiatan penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, perdagangan ikan, logistik, dan aktivitas ekonomi turunannya. Pada sektor kehutanan, keberadaan sumber daya hutan juga membentuk aktivitas ekonomi, meskipun pengelolaannya perlu memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat lokal.

Selain sektor primer, Merauke juga memiliki aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta berbagai jasa lainnya. Sebagai salah satu pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi utama di Papua Selatan, perkembangan kawasan perkotaan Merauke menciptakan kebutuhan tenaga kerja pada toko dan pusat perdagangan, pasar, usaha kuliner, hotel dan penginapan, jasa

transportasi, pergudangan, perbankan, pendidikan, pelayanan kesehatan, konstruksi, dan pelayanan pemerintahan. Dengan demikian, struktur kesempatan kerja di Merauke tidak hanya berada pada sektor pertanian, tetapi tersebar pada berbagai sektor formal dan informal.

Secara lebih spesifik, kesempatan kerja di Kabupaten Merauke dapat berkembang pada beberapa kelompok sektor utama. Pertama, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencakup petani tanaman pangan, pekerja perkebunan, peternakan, nelayan, pengolahan hasil pertanian, dan aktivitas pendukung lainnya. Kedua, sektor perdagangan besar dan eceran yang menyerap tenaga kerja melalui pasar tradisional, toko, distribusi barang, perdagangan hasil pertanian, serta kegiatan usaha mikro dan kecil. Ketiga, sektor konstruksi yang berkembang sejalan dengan pembangunan jalan, gedung, perumahan, fasilitas pemerintahan, dan infrastruktur publik. Keempat, sektor transportasi dan pergudangan yang memiliki peran penting karena karakteristik geografis Merauke membutuhkan mobilitas barang dan manusia melalui transportasi darat, laut, dan udara. Kelima, sektor administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang relatif penting karena Merauke berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Keenam, sektor pendidikan dan kesehatan yang menyerap guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan pekerja pendukung. Ketujuh, sektor akomodasi, makan minum, dan jasa lainnya yang berkembang bersama aktivitas perkotaan, mobilitas penduduk, serta pertumbuhan UMKM.

Keberagaman sektor tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Merauke sebenarnya memiliki basis ekonomi yang berpotensi menciptakan kesempatan kerja yang luas. Namun, potensi ekonomi tidak selalu identik dengan penyerapan tenaga

kerja yang stabil. Sebagian sektor ekonomi memiliki karakter padat lahan dan tidak selalu padat karya. Pengembangan pertanian skala besar, misalnya, dapat meningkatkan nilai produksi dan PDRB, tetapi dampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal sangat bergantung pada teknologi produksi, pola investasi, keterampilan tenaga kerja, struktur kepemilikan usaha, dan keterlibatan masyarakat lokal. Hal yang sama berlaku pada proyek infrastruktur dan investasi berskala besar yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi belum tentu menghasilkan kesempatan kerja jangka panjang apabila pekerjaan yang tercipta bersifat sementara atau membutuhkan keterampilan yang belum dimiliki oleh tenaga kerja lokal.

Fenomena pembangunan Merauke semakin menarik dengan hadirnya berbagai agenda pengembangan pangan berskala besar. Program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dan berbagai kebijakan pengembangan kawasan pangan menunjukkan posisi strategis Merauke dalam agenda ketahanan pangan. Pengembangan tersebut berpotensi meningkatkan investasi, produksi pertanian, pembangunan infrastruktur, aktivitas perdagangan, transportasi, dan permintaan tenaga kerja. Namun, keberhasilan program pembangunan tidak hanya dapat dinilai dari peningkatan produksi dan investasi. Persoalan pentingnya adalah sejauh mana masyarakat lokal memperoleh akses terhadap pekerjaan, peningkatan keterampilan, peningkatan pendapatan, dan perbaikan kualitas hidup.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan inklusivitas pembangunan. Apabila investasi dan peningkatan output ekonomi lebih cepat daripada peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, maka manfaat pertumbuhan dapat tersebar secara tidak merata. Keterbatasan pendidikan, pelatihan vokasi, keterampilan teknis, akses informasi pasar kerja, dan mobilitas tenaga kerja dapat

menyebabkan sebagian masyarakat lokal menghadapi kesulitan dalam memasuki pekerjaan yang membutuhkan kompetensi tertentu. Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung bersamaan dengan ketimpangan kesempatan kerja. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar masyarakat Merauke mampu berpartisipasi dalam transformasi ekonomi daerah.

Indeks Pembangunan Manusia menjadi relevan dalam menjelaskan persoalan tersebut karena pembangunan ekonomi membutuhkan manusia yang sehat, terdidik, dan memiliki standar hidup yang layak. Peningkatan IPM secara teoritis seharusnya memperkuat produktivitas tenaga kerja dan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan ekonomi. Pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan kemampuan memperoleh pekerjaan dan mengadopsi teknologi. Kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan kapasitas kerja dan mengurangi kehilangan waktu produktif. Sementara itu, peningkatan standar hidup dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan investasi sumber daya manusia.

Namun demikian, hubungan antara peningkatan IPM dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat otomatis. Peningkatan indikator pendidikan dan kesehatan belum tentu langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila struktur perekonomian tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga belum tentu meningkatkan IPM secara cepat apabila hasil pembangunan tidak terdistribusi secara merata atau apabila akses pelayanan dasar masih terbatas. Kondisi ini menjadi semakin penting pada wilayah yang memiliki karakter

geografis luas seperti Merauke, karena jarak antarkawasan, persebaran penduduk, dan akses terhadap pelayanan publik dapat memengaruhi pemerataan manfaat pembangunan.

Fenomena utama penelitian ini terletak pada adanya ketidaksinkronan antara potensi ekonomi daerah, dinamika kesempatan kerja, peningkatan pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Merauke memiliki lahan yang luas, potensi pertanian dan perikanan, posisi perbatasan yang strategis, aktivitas perdagangan, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program pengembangan pangan. Secara teoritis, potensi tersebut seharusnya mampu memperluas kesempatan kerja dan mendorong peningkatan kualitas hidup. Namun, realitas pembangunan menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum tentu selalu diikuti oleh kesempatan kerja yang stabil dan manfaat pembangunan yang merata. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kesempatan kerja dan IPM benar-benar menjadi faktor yang mampu menjelaskan perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke.

Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi secara makro dan kondisi pembangunan pada tingkat masyarakat. Pertumbuhan PDRB dapat meningkat karena ekspansi sektor tertentu, investasi besar, belanja pemerintah, atau peningkatan produksi komoditas. Akan tetapi, apabila sektor yang tumbuh tidak menyerap banyak tenaga kerja lokal, maka peningkatan output belum tentu meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas. Demikian pula, peningkatan IPM belum tentu langsung meningkatkan pertumbuhan apabila kualitas tenaga kerja yang membaik tidak bertemu dengan permintaan tenaga kerja yang sesuai. Dengan demikian, hubungan antarvariabel

tersebut bersifat kompleks dan perlu diuji berdasarkan karakteristik spesifik Kabupaten Merauke.

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Secara empiris, terdapat ketidaksesuaian antara teori dan kondisi aktual di Kabupaten Merauke, di mana peningkatan kesempatan kerja secara teoritis diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keterlibatan tenaga kerja dalam proses produksi, sedangkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan meningkatkan produktivitas melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, namun dalam kenyataannya perubahan kesempatan kerja dan peningkatan IPM belum selalu bergerak searah dengan pertumbuhan ekonomi pada setiap tahun. Selain itu, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan, karena sebagian penelitian menemukan bahwa kesempatan kerja dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan atau berbeda akibat struktur ekonomi, tingkat produktivitas tenaga kerja, serta keterkaitan kualitas sumber daya manusia dengan kebutuhan pasar kerja. Kesenjangan juga terlihat dari aspek konteks wilayah, sebab sebagian penelitian terdahulu dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, atau daerah dengan karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda, sedangkan Kabupaten Merauke memiliki karakteristik khusus sebagai wilayah perbatasan, wilayah yang luas, berbasis pertanian dan sumber daya alam, serta menjadi bagian dari Provinsi Papua Selatan yang relatif baru dan lokasi berbagai agenda strategis pengembangan pangan. Dari sisi periode, penelitian ini menggunakan rentang tahun 2015–2024 yang mencakup kondisi sebelum pandemi

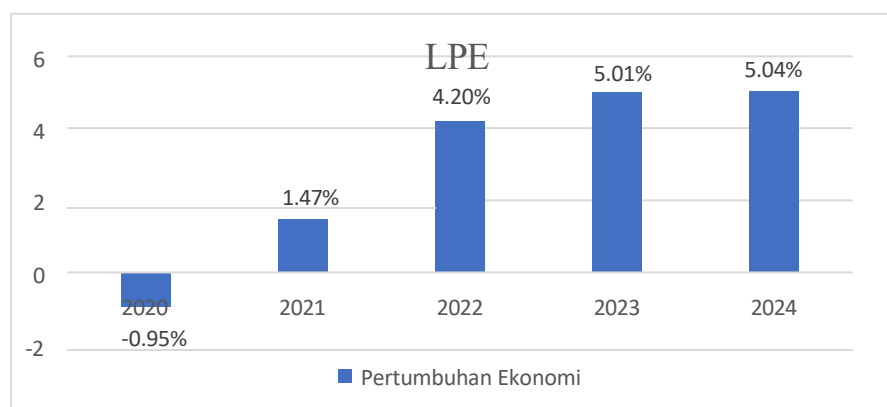
COVID-19, masa kontraksi ekonomi, fase pemulihan, serta perubahan konteks regional setelah pembentukan Provinsi Papua Selatan. Di samping itu, penelitian yang secara khusus mengombinasikan kesempatan kerja sebagai representasi pemanfaatan tenaga kerja dan IPM sebagai representasi kualitas pembangunan manusia dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan dan parsial pengaruh kesempatan kerja dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke selama periode 2015–2024 dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah perbatasan, dinamika sebelum dan sesudah pandemi, perubahan konteks regional pascapembentukan Provinsi Papua Selatan, serta transformasi ekonomi daerah yang ditopang oleh sektor pertanian, perikanan, perdagangan, konstruksi, transportasi, pelayanan publik, UMKM, dan agenda pengembangan pangan berskala besar.

Kebaruan penelitian juga terletak pada upaya untuk menjawab persoalan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Merauke. Penelitian ini tidak hanya mempertanyakan apakah ekonomi daerah tumbuh, tetapi secara lebih spesifik menguji apakah kesempatan kerja sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan produksi dan IPM sebagai indikator kualitas manusia mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini penting karena wilayah yang kaya sumber daya alam dan mengalami peningkatan investasi belum tentu secara otomatis menghasilkan pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara merata.

Oleh karena itu, penelitian mengenai hubungan antara kesempatan kerja, Indeks Pembangunan Manusia, dan pertumbuhan ekonomi menjadi penting

dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai apakah peningkatan kesempatan kerja dan kualitas pembangunan manusia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan. (Kerja et al., 2020).

Gambar 1.1 pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke Tahun 2020-2024



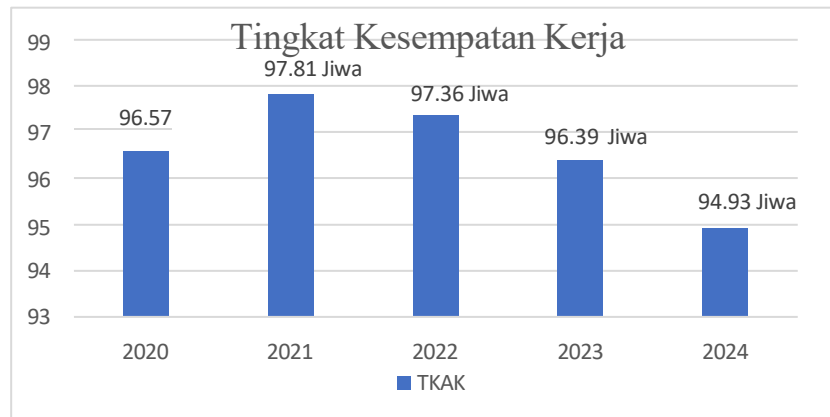
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke 2025

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mencerminkan kemampuan daerah dalam meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa, namun pencapaian tersebut tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi semata, melainkan juga oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kesempatan kerja yang luas dan merata akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, memperkuat daya beli, serta menekan angka kemiskinan, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tingginya tingkat pengangguran dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak dapat

memperlambat laju pembangunan.

Grafik pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami tren peningkatan setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar -0,95 persen akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi mengalami penurunan. Memasuki tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mulai mengalami pemulihan dengan meningkat menjadi 1,47 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat cukup signifikan menjadi 4,20 persen. Peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun 2023 sebesar 5,01 persen dan tahun 2024 sebesar 5,04 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Merauke secara bertahap mengalami pemulihan dan pertumbuhan yang semakin stabil pasca pandemi. Namun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja dan kualitas pembangunan manusia yang optimal. Kesempatan kerja masih mengalami fluktuasi sehingga belum seluruh angkatan kerja mampu terserap secara maksimal dalam kegiatan ekonomi daerah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga masih menjadi tantangan dalam mendukung peningkatan produktivitas masyarakat. Padahal, IPM yang tinggi dapat mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 1.2Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Merauke Tahun 2020– 2024

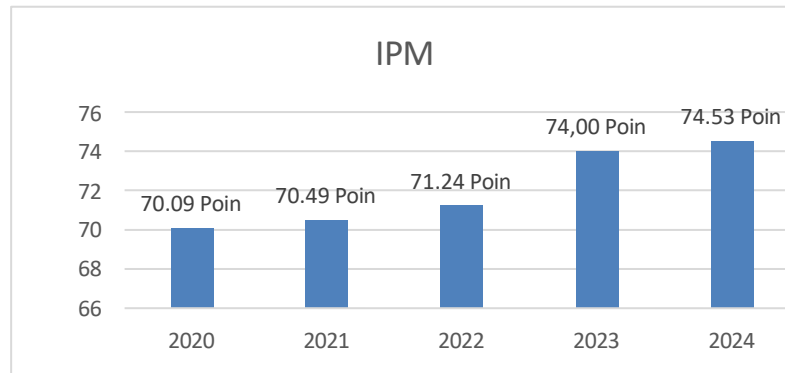


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke 2025

Berdasarkan Gambar 1.2, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Merauke pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan kondisi yang relatif tinggi meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, tingkat kesempatan kerja tercatat sebesar 96,57 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 97,81 jiwa dan merupakan angka tertinggi selama periode pengamatan. Namun, pada tahun 2022 tingkat kesempatan kerja sedikit menurun menjadi 97,36 jiwa. Penurunan tersebut terus berlanjut pada tahun 2023 menjadi 96,39 jiwa dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 94,93 jiwa. Meskipun sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Merauke masih terserap dalam kegiatan ekonomi, tren penurunan tingkat kesempatan kerja dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya permasalahan dalam penyerapan tenaga kerja yang perlu diperhatikan. Kesempatan kerja yang menurun dapat berdampak pada rendahnya produktivitas masyarakat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesempatan kerja. Semakin tinggi IPM, maka kualitas

pendidikan, kesehatan, dan kemampuan masyarakat dalam bekerja akan semakin baik sehingga mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, kesempatan kerja dan IPM memiliki keterkaitan yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke secara berkelanjutan.

Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Merauke Tahun 2015–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke 2025

Berdasarkan Gambar 1.3, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Merauke pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Merauke tercatat sebesar 70,09 poin. Selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 70,49 poin. Peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun 2022 menjadi 71,24 poin. Pada tahun 2023, IPM kembali mengalami peningkatan cukup signifikan hingga mencapai 74,00 poin dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 74,53 poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Merauke mengalami perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Peningkatan IPM mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka kemampuan masyarakat dalam bekerja, berproduksi, dan memanfaatkan teknologi juga akan semakin meningkat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut

dapat mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, IPM menjadi salah satu indikator penting yang diduga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke.

Melihat kondisi perkembangan ekonomi di Kabupaten Merauke yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi namun belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja dan kualitas pembangunan manusia, maka diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kesempatan kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kesempatan kerja dan kualitas sumber daya manusia mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian secara empiris menggunakan data mengenai apakah kesempatan kerja dan IPM benar-benar memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke.

Fenomena yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke tidak selalu berjalan searah dengan perkembangan kesempatan kerja dan peningkatan IPM. Pada beberapa tahun, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, namun tingkat kesempatan kerja justru mengalami fluktuasi. Di sisi lain, IPM memang menunjukkan peningkatan setiap tahun, tetapi peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong pemerataan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja secara optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan empiris mengenai apakah kesempatan kerja dan IPM benar-benar memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke, atau terdapat faktor lain yang lebih dominan memengaruhinya.

Research Gap dalam penelitian ini terdapat pada Penelitian terdahulu mengenai hubungan kesempatan kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Secara

teoritis, peningkatan kesempatan kerja seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, sementara IPM yang lebih tinggi diharapkan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Namun, realitas empiris di Kabupaten Merauke menunjukkan ketidaksinkronan: pertumbuhan ekonomi mengalami tren positif pasca pandemi, tetapi kesempatan kerja justru berfluktuasi dan IPM meskipun meningkat belum sepenuhnya mendorong pemerataan kesejahteraan. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada tingkat nasional atau provinsi dengan karakteristik wilayah berbeda, sehingga belum secara spesifik menyoroti konteks Merauke sebagai daerah perbatasan, wilayah berbasis pertanian dan sumber daya alam, serta bagian dari Provinsi Papua Selatan yang baru terbentuk. Periode analisis yang digunakan juga terbatas, sementara penelitian ini mencakup rentang 2015–2024 yang meliputi fase sebelum pandemi, masa kontraksi, pemulihan, hingga transformasi ekonomi daerah.

Novelty atau Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian simultan dan parsial pengaruh kesempatan kerja dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah perbatasan, dinamika pasca pandemi, serta perubahan konteks regional setelah pembentukan Provinsi Papua Selatan. Penelitian ini tidak hanya menilai apakah ekonomi daerah tumbuh, tetapi juga menguji apakah pertumbuhan tersebut bersifat inklusif, yakni mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif menjadikan penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung menekankan aspek makro semata. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur ekonomi pembangunan, khususnya terkait hubungan antara kesempatan kerja, kualitas pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan karakteristik unik seperti Kabupaten Merauke

Dengan demikian, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kesempatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Merauke”**, yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana kedua variabel tersebut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang diatas, maka itu peneliti mengetahui bagaimana nantinya fokus permasalahannya diantaranya yaitu:

- 1) Apakah kesempatan kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke?
- 2) Apakah Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis pengaruh kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke.
- 2) Menganalisis pengaruh Indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Merauke.

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan berbasis data, khususnya dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja dan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian mengenai pengaruh kesempatan kerja dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menentukan prioritas program pembangunan, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pengembangan kualitas tenaga kerja guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.

b. Bagi Perencana Pembangunan dan Instansi Terkait

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya, khususnya dalam merancang program yang berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai strategi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan yang telah

dilaksanakan di Kabupaten Merauke.